

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Hukum Kebiri terhadap pelaku pedofilia

Hukum kebiri yang dianut oleh Indonesia adalah hukuman yang diberikan kepada para pelaku pedofilia yang melakukan tindakan kekerasan seksual pada anak, baik dalam bentuk sentuhan terhadap alat genital anak, menggesekkan kemaluannya pada tubuh anak, melakukan masturbasi kepada anak, melakukan penetrasi penis sebagian atau seluruhnya terhadap alat genital anak atau memaksa anak-anak untuk melakukan oral atau anal genital.

Untuk mendekatkan pemahaman pembaca terkait dengan kebiri, maka penulis akan menjabarkannya sebagai berikut :

1. Defenisi Kebiri

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa kebiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sudah dihilangkan (dikeluarkan) kelenjer testisnya atau dipotong ovariumnya ; sudah dimandulkan.²⁵ Dalam bahasa Arab, Kebiri (*al ikhsha`, castration*) artinya adalah pemotongan dua buah dzakar (*alkhushyatain, testis*), yang dapat dibarengi dengan pemotongan penis (*dzakar*). Jadi kebiri dapat berupa pemotongan testis saja, dan inilah pengertian dasar dari kebiri. Namun adakalanya kebiri berupa pemotongan testis dan penis sekaligus. Kebiri bertujuan menghilangkan sahwat dan sekaligus menjadikan seseorang menjadi mandul.

²⁵ Dikutip dari kbbi.web.id/kebiri, diakses pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 pukul 01.40 WIB

Metode kebiri secara garis besar ada dua macam, yaitu metode fisik dan metode *hormonal* (suntikan). Metode fisik dilakukan dengan cara memotong organ yang memproduksi *testosteron*, yaitu testis. Setelah testis dipotong dan dibuang melalui operasi, sisanya diikat dan kemudian dijahit. Dengan pemotongan testis tersebut, berarti sudah dihilangkan *testosteron* sebagai hormon pembangkit gairah seks. Akibatnya laki-laki akan kehilangan gairah seks dan sekaligus menjadi mandul permanen.

Adapun metode kebiri hormonal, dilakukan bukan dengan memotong testis atau penis, tapi dengan cara *injeksi* (suntikan) hormon kepada orang yang dikebiri. Ada dua metode *injeksi*. Pertama, diinjeksikan obat yang menekan produksi hormon *testosteron*. Injeksi dilakukan berulang-ulang sehingga hormon *testosteron* seolah-olah hilang. Kedua, diinjeksikan hormon *estrogen* kepada orang yang dikebiri, sehingga ia memiliki ciri-ciri fisik seperti perempuan. Hormon *testosteron* akan menurun dan gairah seksual juga akan ikut menurun. Bila suntik hormon *testosteron* ini dihentikan, keadaan orang yang dikebiri akan pulih seperti semula.

Berdasarkan definisi di atas dapat penulis simpulkan bahwa apabila kebiri di maknai secara tekstual, maka kebiri adalah memotong atau menghilangkan fungsi fisik genetikal seseorang baik itu pria maupun wanita. Aplikasi dari bentuk kebiri semacam ini seperti pemotongan testis saja, atau testis sekaligus penis. Namun apabila kebiri dimaknai secara kontekstual, maka dapat dipahami bahwa kebiri adalah menghilangkan saluran mani atau saluran nafsu seksual seseorang tanpa menghilangkan alat genetikal seseorang. Pendekatan kontekstual inilah

yang lebih dekat dengan bahasan dalam tulisan ini, yaitu melakukan kebiri dengan cara memotong saluran mani atau saluran nafsu seseorang dengan cara melakukan injeksi dengan hormon tertentu sehingga menekan nafsu birahi agar tidak muncul dengan tujuan agar nafsu seksual tidak diselewengkan.

2. Ruang Lingkup Kebiri

Dibeberapa negara praktek pengebirian sudah diberlakukan sebagai salah satu hukuman yang bersifat khusus. Dalam pelaksanaanya sistem pengebirian memiliki dua metode yang pernah dilakukan oleh manusia, yaitu pengebirian bedah yang menghilangkan fungsi testis secara langsung melalui operasi dan pengebirian kimia dengan cara memberikan suntikan obat khusus. Masing-masing metode memiliki efek fisik maupun psikologi yang berbeda.

a. Pengebirian Bedah (*Surgical Castration*).

Pada masa Eropa kuno, pengebirian bedah dilakukan sebagai salah satu hukuman atas pelanggaran yang lebih terarah kepada aliran-aliran sesat atau ilmu hitam. Saat ini secara prosedural pengebirian bedah merupakan proses mengurangi atau bahkan menghilangkan gairah seksual pria ataupun wanita. Pengebirian bedah pada wanita dicapai dengan Cara menghilangkan sel telur pada ovarium atau disebut dengan *oophorectomy*. Selama proses operasi *oophorectomy* ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Setelah pelaksanaan operasi pun seorang wanita setidaknya membutuhkan waktu sekitar empat sampai enam minggu untuk masa pemulihan agar bisa beraktifitas normal kembali. Sedangkan

pada pria, pengebirian bedah memiliki prosedur yang relatif sederhana dan masa pemulihan yang tidak lama.

Kebiri bedah pada pria pada umumnya dilakukan dengan cara mengangkat testis, dimana testis adalah organ reproduksi pria yang menghasilkan hormon testosteron. Hormon testosteron ini selain dihasilkan oleh testis sebagian kecil pada pria diproduksi di kelenjer anak ginjal. Jika seorang pria tidak mempunyai testis, maka hormon testosteronnya hanya diproduksi oleh kelenjer anak ginjal yang jumlahnya sedikit yang dapat mengakibatkan berkurangnya hasrat seksual bahkan mungkin hilang sama sekali.

Testis dibungkus oleh lapisan fibrosa yang disebut tunika albuginea. Di dalam testis terdapat banyak saluran yang disebut tubulus seminiferus. Tubulus ini dipengaruhi oleh lapisan sel sperma yang sudah atau tengah berkembang. Spermatozoa (sel benih yang sudah siap untuk diejakulasikan), akan bergerak dari tubulus menuju rete testis, duktus efferent, dan epididimis. Bila mendapat rangsangan seksual, spermatozoa dan cairannya akan dikeluarkan ke luar tubuh melalui vas deferens dan akhirnya penis. Di antara tubulus seminiferus terdapat sel khusus yang disebut sel intersial leydig, yakni sel yang memproduksi testosterone.²⁶

Pengebirian bedah memang dianggap sangat efektif dalam mencapai beberapa tujuan yang salah satunya adalah menurunkan gairah seksual kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan mencegah terjadinya pengulangan.

²⁶ Nelly Karlinah dan Efrida Yanti, *Bahan Ajar Embriologi Manusia*, (Yogyakarta; Deepublish, 2015), hlm. 276

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada beberapa konsekwensi yang dapat ditimbulkan dari pengebirian bedah, antara lain :

- 1) Mengalami kemandulan seutuhnya
- 2) Hilangnya kemampuan untuk mencapai ereksi atau kekuatan massa otot dan hilangnya hasrat
- 3) Kesulitan menjalin kontak seksual terhadap lawan jenis
- 4) Rambut pada kemaluan dan bagian muka berhenti tumbuh
- 5) Ketidakmampuan untuk memproduksi hormon estosteron
- 6) Hilangnya simbolik kedewasaan dan kewanitaan
- 7) Infeksi jangka panjang.

Efek samping tersebut di atas merupakan hal yang umumnya terjadi bagi para tindak pidana yang menjalani hukuman kebiri bedah. Namun kemudian, seiring perkembangan zaman dan pemikiran lahirlah semangat dan isu *human right* yang menganggap bahwa pengebirian bedah adalah suatu hukuman yang dianggap keji dan tidak sesuai dengan kodrat dan hak-hak azazi manusia. Alasan tersebut didasari perkembangan medis yang menjadi dasar hukuman kebiri kimia atau injeksi antiandrogen timbul sebagai salah satu alternatif yang dirancang untuk tetap memberikan hukuman namun disesuaikan dengan keadaan.

b. Kebiri Kimia (*chemical castration*)

Kebiri kimia dilakukan dengan menyuntikkan hormon antiandrogen atau antagonis androgen yang dapat menghambat sintesa atau kerja androgen. Antiandrogen merupakan lawan reseptor hormon, senyawa ini bekerja dengan

menghalangi efek biologis dari androgen, atau hormon seks pria melalui obstruksi atau persaingan untuk situs pengikat sel.²⁷

Pada dasarnya, kebiri kimia adalah memasukkan bahan kimia antiandrogen ke dalam tubuh melalui suntikan atau pil yang diminum. Antiandrogen ini berfungsi melemahkan hormone testosteron sehingga menyebabkan hasrat seksual orang yang mendapatkan suntikan atau minum pil yang mengandung antiandrogen tersebut berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Tiga obat kimia yang berperan untuk mengurangi testosteron yaitu:

1) *Cyproterone Acetate* (CPA)

Cyproterone acetate merupakan sebuah progesteron aktif yang bersaing dengan dihidrotestosteron yang merupakan androgen intraselular utama pada sebagian besar jaringan target.²⁸ berperan untuk mengikat reseptor androgen. Obat ini juga menekan LH dan FSH, serta memiliki kualitas progestasional. Obat ini dapat mengeliminasi nafsu dan gairah seksual dengan mengurangi tingkat testosteron secara dramatis. Dosis obat ini 100mg perhari. Akan tetapi hal ini hanya bersifat sementara²⁹, libido akan menghilang dalam waktu dua minggu setelah pengobatan dimulai dan akan pulih kembali dalam dua minggu jika pengobatan

²⁷ Sridianti, *Pengertian Efek Samping Anti Androgen*, dikutip dari <http://www.sridianti.com/pengertian-efeksamping-antiandrogen.html>, pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 jam 14.45 WIB.

²⁸ Janet L. Stringer, *Konsep Dasar Farmakologi: Panduan untuk Mahasiswa*, terj: Huriawati Hartanto, (Jakarta; EGC, 2009), hlm 262.

²⁹ V. Mark Durand dan David H. Barlow, *Intisari Psikologi Abnormal*, terj: Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 111.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihentikan.³⁰ Dengan kata lain jika pengobatan dihentikan nafsu dan gairah seksual tersebut akan kembali lagi.

2) Medroxyprogesterone Acetate (MPA)

Medroxyprogesterone acetate atau yang dikenal sebagai Depo Provera berisi progesteron sintetis. Dengan menyuntikkan lebih banyak hormon wanita ke tubuh pria, hasrat seksual pria akan turun. Depo Provera, yang nama generiknya adalah depot medroxyprogesterone acetate, biasanya digunakan untuk mengontrol kehamilan pada wanita subur. Jadi, ini masuk golongan obat kontrasepsi yang bisa digunakan untuk kebiri kimia. Obat ini disuntikkan ke dalam vena, dengan masa kerja aktif selama 14-15 minggu. Setelah itu, efek obat akan hilang dan perlu disuntik kembali. “Depo Provera dapat menekan produksi hormon testosteron sehingga menyebabkan menurunnya bahkan hilangnya fungsi hormon itu,” kata Mohammad Hasan Machfoed, Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia. Efeknya beruntun, antara lain dorongan seksual menurun, tidak bisa ereksi, testis mengkerut, produksi sel sperma turun, massa otot menyusut, tulang keropos, mudah lelah, dan payudara membesar.³¹

3) Leuprolide dan Triptorelin

³⁰ Joyce L. Kee dan Evelyn R. Hayes, *Farmakologi: Pendekatan Proses Keperawatan*, terj: Peter Anugera, (Jakarta: ECG, 1996), hlm. 686

³¹ Tri Artining Putri, *Kisah Laksamana Cheng Ho dan 2 Cara Kebiri*, dikutip dari <https://m.tempo.co/read/news/2016/06/08/061778023/>, pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 jam 15.30 WIB.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengobatan dengan triptorelin dilaporkan berhasil mengakhiri perilaku penyimpangan seksual. Meskipun demikian, kelainan tersebut akan kambuh lagi jika pengobatan dihentikan. Leuprolid adalah penghambat sintesa testosteron yang efektif. Jika obat ini diberikan dalam waktu yang lama, kadar RH dan testosteron akan menurun akibatnya obat ini dapat mengurangi gairah seksual, dan dapat mengurangi tingkat testosteron hingga mendekati angka nol.³²

Kebiri kimia merupakan suatu bentuk hukuman dan tindakan rehabilitasi.

Hukuman kebiri kimia juga banyak menghabiskan biaya lebih bila dibandingkan dengan hukuman dalam bentuk penahanan. Hal ini karena hukuman kebiri melibatkan perawatan medis di rumah sakit.³³ Teknik pengebirian baik yang melalui metode bedah ataupun metode kimia dapat menimbulkan dampak negatif bagi pelaku disebabkan manipulasi hormon dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga karena hormon ini menyebar luas ke seluruh tubuh.³⁴

3. Pelaksanaan Kebiri di Berbagai Negara

Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang “melegalkan” hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pelaku

³² N. Nursiyanti, *Hukuman Kebiri bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia*, dikutip dari digilib.uinsby.ac.id/8996/6/Bab%203.pdf, pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 jam 11.20 WIB.

³³ EM Tullio, *Chemical Castration for Child Predators: Practical, Effective, and Constitutional*, dikutip dari digitalcommons.chapman.edu/cgi/viewcontent.cgi?article, pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 jam. 11.30 WIB.

³⁴ Samantha Valliant Court, *Chemical Castration: How a Medical Therapy Became Punishment and the Bioethical Imperative to Return to a Rehabilitative Model for Sex Offenders*, dikutip dari https://wakespace.lib.wfu.edu/.../Vaillancourt_wfu_0248M_10, ada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 jam. 11.40 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pemeriksaan. Setidaknya terdapat 25 negara yang telah melaksanakannya, diantaranya adalah:³⁵

No	Negara	Keterangan	Perkembangan Terbaru
1	Korea Selatan	Korea Selatan menjadi negara pertama di Asia yang melegalkan hukuman kebiri di tahun 2011. Undang undang tersebut disahkan pada bulan Juli dan mengizinkan suntikan kebiri pada terdakwa kejahatan seksual berusia di atas 19 tahun	Hanya dua pria yang telah menjalani hukuman tersebut.
2	Inggris	Inggris telah sejak lama menerapkan hukuman kebiri	Sebanyak 25 napi secara sukarela melakukan suntikan ini di tahun 2014. Kebijakan ini merupakan turunan pasca perang dunia II, di mana pada saat itu tindakan homoseksual masih ilegal dan homoseksualitas secara luas dianggap sebagai penyakit mental yang dapat diobati.
3	Amerika Serikat	Sembilan negara bagian, diantaranya California, Florida, Oregon, Texas dan Washington yang menerapkan hukuman kebiri	Mendapat banyak tantangan, medrogsiprogesteron asetat (MPA) tidak pernah disetujui oleh FDA untuk digunakan sebagai pengobatan untuk pelanggar seksual
4	Rusia	Menerima chemical castration untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Para penjahat seksual harus dinyatakan benar-benar paedofilia oleh panel dokter	Pada Oktober 2011, parlemen Rusia meloloskan aturan hukum yang mengizinkan pengadilan untuk memerintahkan hukuman kebiri kimiawi terhadap pelaku kejahatan seksual. Hukuman tersebut mengancam pelaku kejahatan seksual yang menyerang anak-anak di bawah usia 14

³⁵ Supriyadi Widodo, Menguji, hlm. 10-14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

			tahun.
5	Polandia	Sejak tahun 2010 Polandia sudah menerapkan hukuman kebiri bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak. Tetapi para napi harus didampingi psikiater sebelum menjalani hukuman ini	
6	Moldova	Pada tanggal 6 Maret 2012, pemerintah Moldova mulai memberlakukan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual anak	Namun hukuman ini mendapat tentangan dari Amnesty internasional yang menyebutkan bahwa setiap tindak kejahatan tidak dibenarkan dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan deklarasi HAM Universal.
7	Estonia	Pemerintah Estonia memberlakukan hukuman kebiri kimiawi terhadap pelaku kejahatan seks pada tanggal 5 Juni 2012	Utamanya dikenakan pada pelaku penyimpangan seks pada anak kecil
8	Israel	Tidak diketahui secara pasti sejak kapan Israel memberlakukan hukuman ini	Namun media setempat, Haeretz sempat memberitakan dua pelaku kejahatan seks anak yang sepakat untuk menjalani hukuman kebiri secara kimiawi pada Mei 2009
9	Argentina	Baru diberlakukan di satu provinsi Mendoza sejak tahun 2010	Aturan yang disahkan melalui dekret oleh pemerintah provinsi
10	Australia	Kastrasi dalam hukum pidana untuk kekerasan seksual terhadap anak dan pemerkosa. Hukuman kebiri kimiawi hanya berlaku di beberapa negara bagian saja, diantaranya Queensland dan Victoria	Pada tahun 2010, seorang pelaku kejahatan seksual anak yang berulang kali terjerat hukum di north Queensland kembali diadili karena meraba dan mencium gadis di bawah umur. Pria ini telah menjalani hukuman kebiri kimia dengan secara sukarela mendapat pengobatan untuk mengurangi libidonya.
11	Jerman	Pada tahun 1960 dokter Jerman menggunakan	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

		antiandrogen sebagai pengobatan untuk seksual paraphilia. Di Jerman praktek ini adalah bagian dari perawatan dan bukan hukuman	
12	Norwegia	Mempraktekkan kebiri sejak sebelum perang dunia II. Dan hukuman ini pada umumnya diberikan atas kesediaan terpidana.	
13	India	Pengadilan di selatan India mendesak pemerintah membentuk undang-undang yang mencakup hukuman kebiri bagi pelaku perkosaan terhadap anak	Usulan ini mendapat tantangan karena dianggap kurang efektif
14	Taiwan	Menerapkan suntik kebiri khusus pada pedofilia dan residivis kejahatan seksual anak	
15	Turki	Turki kemungkinan akan mulai menerapkan hukum kebiri kimia bagi paedofil	Namun, belum ada penjelasan implementasi teknis.
16	Belanda	Pelaku kejahatan seksual boleh memilih hukuman baginya, apakah dipenjara dalam waktu lama atau dikebiri kimia untuk meredam birahinya yang tidak wajar	
17	Republik Ceko	Sudah digunakan sebagai hukuman untuk pelaku kejahatan seksual	Terdapat lebih dari 50 kasus kejahatan seksual yang diberi hukuman kebiri kastrasi antara tahun 2001-2006
18	Selandia Baru	Pada November 2000 pedofil Robert Jason dihukum dengan suntikan Cyproterone Asetat.	Banyak ditentang karena efektifitasnya secara etis dan praktis sangat sulit untuk dilaksanakan

Meskipun beberapa negara tersebut di atas sudah memasukkan pasal hukuman atau tindakan/perawatan kebiri dalam hukum pidana mereka, namun dalam banyak kajian ternyata sulit menerapkannya. Hukum acara yang mengatur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penerapan pasal tersebut mengalami kesulitan, karena harus melakukan diagnosa terlebih dahulu sebelum menerapkannya, karena tidak semua pelaku dikebiri, tetapi harus dilakukan diagnosa lebih dahulu kesehatannya dan implikasi medisnya. Biaya untuk melaksanakan hukuman kebiripun tidak murah. Spesialis urologi dari Asri Urology Center, dr. Arry Rodjani, SpU, mengatakan, kebir kimia membutuhkan biaya mulai dari Rp 700 ribu untuk sekali penggunaan ke satu orang. Arry mengatakan bahwa sekali suntik obat hanya mampu bekerja untuk menurunkan gairah seksual selama satu hingga tiga bulan saja.³⁶

Berdasarkan penerapan dan penggunaanya secara umum hukuman kebir dapat dibagi menjadi tiga tipe. yaitu “*mandatory*”, “*discretionary*”, dan “*voluntary*”. Perbedaannya terdapat dari bagaimana kebir diterapkan dalam hukum pidana, dalam hal *mandatory*, maka kebir dijatuhkan langsung ketika pidana terjadi, *discretionary* dijatuhkan dalam hal pidana dijatuhkan sebagai opsi, tidak ada kewajiban bagi hakim, sedangkan *voluntary* diberikan hanya dalam hal mendapatkan kesepakatan oleh seseorang yang akan dikebiri.³⁷

Perdebatan terhadap hukum kebir terjadi di semua negara yang menerapkan hukuman ini, banyak kontroversi yang terjadi dari mulai efektifitas, biaya, hak asasi manusia, sampai dengan proses tehknis yang melibatkan pengawasan, administrasi dan profesional. Hasil yang awal yang ditemukan adalah jumlah negara yang menempatkan hukum kebir sebagai kewajiban

³⁶ Winda Destiana Putri, *Suntik Kebiri Keluarkan Biaya Tak Murah*, dikutip dari <http://gayahidup.republika.co.id/berita/gaya-hidup/info-sehat/15/10/23/nwo7hd359-suntik-kebiri-keluarkan-biaya-tak-murah>, diakses pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 pukul 04.05 WIB.

³⁷ Institute For Criminal Justice Reform, *Hukum Kebiri: Indonesia Latah atau Tanpa Solusi*, dikutip dari <http://icjr.or.id/hukum-kebiri-indonesia-latah-atau-tanpa-solusi/>, diakses pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 pukul 03.20 WIB

merupakan minoritas, hanya sebagian kecil negara di AS, Eropa hanya beberapa negara yang dapat dipastikan menjadikan kebiri sebagai hukuman wajib seperti Polandia dan Moldova. Sisanya disusul oleh negara yang memposisikan hukum kebiri sebagai *discretionary* (opsi/tambahan), di Asia, tipe ini yang diperkenalkan oleh Korea Selatan.

Angka terbanyak, kebiri dijadikan sebagai *voluntary*, artinya membutuhkan kesepakatan dari pelaku, beberapa negara yang oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, seperti Australia, Inggris dan Jerman memposisikan Kebiri mutlak harus mendapatkan persetujuan dari pelaku.

4. Kebiri sebagai tindakan sterilisasi

Pada dasarnya, kebiri adalah salah satu metode kontrasepsi untuk mencegah kehamilan. Prosedur bagi seorang laki-laki yang tidak ingin memiliki keturunan dalam dunia kontrasepsi dikenal dengan istilah vasektomi, yaitu operasi kecil yang dilakukan untuk mencegah transportasi sperma pada testis dan penis. Setelah *vasektomi* dilakukan sperma laki-laki tidak bisa lagi keluar dari testis sehingga tidak lagi memungkinkan untuk terjadinya pembuahan.³⁸

Vasektomi dianggap sebagai metode kontrasepsi permanen walaupun tetap dimungkinkan untuk dilaksanakan pembatalan dengan cara melaksanakan operasi *vasovastotomi*. Hanya saja proses pembatalannya lebih rumit dan memerlukan waktu yang lama dibandingkan dengan proses pelaksanaan vasektomi. Semakin jauh jarak antara pelaksanaan *vasektomi* dan *vasovastotomi* maka peluang sukses

³⁸ *Kebiri dan Kanker Prostat*, dikutip dari <https://obat.kanker.prostat.stadiumempat.wordpress.com/2016/05/30/kebiri-dan-kanker-prostat>, diakses pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 jam 9.40 WIB.

akan semakin rendah.³⁹ Hanya saja seiring perkembangan teknologi kedokteran pelaksanaan vasektomi saat ini sudah dimungkinkan untuk dilakukan pengikatan atau penyumbatan saluran sperma tanpa harus diputus sehingga apabila pelaku vasektomi menginginkan pembatalan ikatan tersebut dapat dibuka kembali atau rekanalisasi.

Menurut KH. Afifuddin Muhajir, *vasektomi* ialah tindakan memotong dan mengikat saluran *spermatozoa* dengan tujuan menghentikan aliran *spermatozoa*, sehingga air mani tidak mengandung *spermatozoa* pada saat ejakulasi tanpa mengurangi volume air mani. Atau usaha mengikat atau memotong saluran benih pria (*vas deferens*) sehingga pria itu tidak dapat menghamilkan. Apabila hal yang sama dilakukan terhadap wanita, dinamakan tubektomi, ialah usaha mengikat atau memotong kedua saluran telur, sehingga wanita itu pada umumnya tidak dapat hamil kembali.⁴⁰

Menariknya persoalan hukum vasektomi ini dalam kurun waktu lebih kurang 30 tahun (1979 sampai dengan 2012) ditetapkan hukumnya dalam bentuk fatwa MUI sebanyak empat kali; tiga kali fatwa dinyatakan haram dan yang terakhir dinyatakan haram kecuali keadaan memenuhi syarat. Yang terakhir inilah menegaskan kebolehan (*ibah*) vasektomi dengan syarat.

Pertama, di tahun 1979, masa-masa awal gencarnya program Keluarga Berencana, MUI memfatwakan keharaman vasektomi dengan dua alasan pokok, yaitu 1) vasektomi merupakan bentuk usaha pemandulan, sedangkan pemandulan

³⁹Lika Aprilia Samiadi, *7 Pertanyaan Yang Sering Diajukan Seputar Vasektomi*, dikutip dari <https://hellosehat.com/apa-itu-vasektomi-risiko-dan-manfaat>, diakses pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 jam. 9.45.

⁴⁰Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Ditjen BIPH Departemen Agama RI, 2010), hlm. 299.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dilarang oleh Islam; 2) di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa *vasektomi* dapat disambung kembali.⁴¹ Kedua, pada tahun 1983, pada forum Musyawarah Nasional tentang kependudukan, kesehatan dan pembangunan, tanggal 17–30 Oktober 1983, MUI kembali menegaskan keharaman *vasektomi* dan *tubektomi* menguatkan fatwa tahun 1979. Dalam keputusannya, hanya karena alasan darurat *vasektomi* dan *tubektomi* bisa dibolehkan seperti terancamnya jiwa si janin apabila mengandung atau melahirkan.⁴² Ketiga, pada bulan Januari 2009 dilaksanakan forum *ijtim* ‘ ulama komisi fatwa MUI ketiga di Padang Panjang Sumatera Barat. Menjelang pelaksanaan forum tersebut, Pemerintah cq. Departemen Kesehatan RI dan BKKBN berusaha mendekati dan memohon agar MUI merevisi hukum *vasektomi* dari haram menjadi *mubah* atau tidak haram. Hal itu dilakukan Pemerintah mengingat pentingnya *vasektomi* sebagai salah satu metode KB pria yang paling efektif dan minim resiko dibanding metode KB wanita atau kontrasepsi lain.⁴³ Angka kesertaan KB pria khususnya *vasektomi* sangat rendah, di bawah 0,2% dibanding metode KB yang lain. Sementara, Pemerintah menganggap salah satu hambatan program KB pria *vasektomi* adalah fatwa haram MUI. Maka dibangun atau disusunlah argumentasi bahwa *vasektomi* memungkinkan direkanalisis, sehingga alasan hukum haram berupa pemandulan permanen tereliminasi atau terbantah. Tetapi argumentasi tersebut dianggap tidak cukup kuat karena kurang atau tidak adanya bukti, sehingga ulama tetap memandang *vasektomi* sebagai usaha pemandulan. Maka lahirlah keputusan fatwa

⁴¹*Ibid*, hlm. 331

⁴²*Ibid*, hlm. 299

⁴³Penjelasan Erna Sulistiyowati, Kepala Bidang KB-KR Kementerian Kesehatan, tanggal 21 Maret 2013, dikutip dari Muhyiddin, *Fatwa MUI tentang Vasektomi*, (Al-Ahkam : Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 2014), hlm. 71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ketiga kalinya dengan hukum haram pada tanggal 26 Januari 2009.⁴⁴ Keempat, menjelang diselenggarakannya forum *ijtim* ‘ulama keempat, 29 Juni – 2 Juli 2012 di Cipasung Tasikmalaya, Pemerintah kembali mengajukan dan menguatkan argumentasi berkaitan dengan bukti keberhasilan rekanalisasi (Surat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, No. TU.05.02/V/1016/ 2012, tanggal 11 Juni 2012, tentang Permohonan Peninjauan Vasektomi). Ada dua bukti penguat yang diajukan: 1) Pemerintah (BKKBN Provinsi Jawa Tengah) dengan menggandeng MUI Provinsi Jawa Tengah dan MUI Kabupaten Situbondo (Jawa Timur) menemukan bukti nyata bahwa rekanalisasi benar-benar berhasil, yaitu pernyataan dan testimoni Mbah Poleng (Njoto Djatmiko), asal Surabaya dengan istri keduanya melahirkan dua orang anak perempuan dan laki-laki, setelah lebih kurang satu tahun direkanalisasi. Sebelumnya dia telah melakukan *vasektomi* beberapa tahun dengan istri pertama yang kemudian meninggal (melaksanakan *vasektomi* September 1988, melakukan rekanalisasi 13 Juli 1999, anak pertama perempuan lahir 17 Juni 2000, anak kedua laki-laki lahir 8 Desember 2006). Bukti berupa pernyataan dan testimoni yang bersangkutan terlampir. 2) Kecuali bukti tersebut huruf a, juga dikuatkan dengan bukti pernyataan Perhimpunan Dokter Spesialis Urologi Indonesia (IAUI), tanggal 9 Juni 2012, dilaksanakan di Hotel Aston Bogor, bahwa rekanalisasi secara medis profesional bisa berhasil.⁴⁵

Maka melalui kajian bukti baru tersebut yang dianggap sebagai *‘illat* hukum vasektomi, *ijtim* ‘ulama menetapkan fatwa alternatif *mub h* atau boleh

⁴⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III*, (Jakarta : MUI, 2009), hlm. 61.

⁴⁵ Muhyiddin, *Fatwa MUI Tentang Vasektomi*, (Jakarta: Ditjen BIPH Departemen Agama RI, 2010), hlm. 72

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan syarat yang sesuai dengan syariat Islam, diantaranya : pelaku *vasektomi* masih memiliki kemungkinan rekanalisasi dan di kemudian hari bisa normal kembali. Selain itu, pelaku *vasektomi* sudah berusia 50 tahun, dia sudah beristri, istrinya menyetujui melakukan *vasektomi*, serta *vasektomi* itu dilakukan bukan untuk tujuan melakukan maksiat.⁴⁶

Metode kontrasepsi seperti ini sesungguhnya bukanlah hal yang baru. Pada zaman dahulu kebiri dalam dimensi yang berbeda dilakukan kepada para penjaga istana agar tidak mengganggu wanita dalam istana. Pada zaman sekarang kebiri dilakukan atas kesadaran sendiri dan berfungsi sebagai salah satu bentuk kontrasepsi permanen dan modern yang dalam Islam masih terjadi perbedaan pendapat mengenai hukum melaksanakannya.⁴⁷

Dalam Islam kebiri dikaitkan dengan istilah *tabattul*, yaitu “pemutusan” atau “pemisahan”, bentuk masdar dari *battala yubattilu tabtilan* yang artinya putus atau pisah. Dalam Q.S. Al-Muzammil {73} ; 8, disebutkan :

وَأَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَيَّلْ إِلَيْهِ تَبْيِيلًا

Artinya : “Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadatlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan”.⁴⁸

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Maryam disebut *al-b tul* karena dia terpisah dari hubungan suami manapun, yang artinya perawan atau bujang dan tidak ada seorangpun wanita yang dapat menandinginya.⁴⁹

⁴⁶Rofiuddin, MUI Bolehkan Vesektomi, dikutip dari <https://m.tempo.co/read/news/2012/07/04/173414681>, diakses pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 jam. 10.00 WIB.

⁴⁷Prof. Dr. Amin Summa, *Al-Quran dan Serangan Orientalis (Nasikh Mansukh dalam Tinjauan Historis, Fungsional dan Shar'i*, (Depok :Al-Insan, 2005), hlm. 32

⁴⁸Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Indah Pres, 2002), hlm. 988

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu Ismail al-Harawi, pengarang kitab *Man zil al-Sairin* mengatakan *tabattul* artinya memisahkan diri dari segala sesuatu agar bisa beribadah kepada Allah secara total. Beliau juga membagi derajat *tabattul* menjadi tiga tingkatan, yaitu :

- a. Memurnikan pemutusan hubungan dengan keinginan-keinginan terhadap dunia, karena takut, mengharap atau karena selalu memikirkan-Nya.
 - b. Memurnikan pemutusan hubungan dari mengikuti nafsu dengan menjauhi hawa nafsu, menghembuskan rahmat Allah dan memasukkan kilat cahaya ilmu.
 - c. Memurnikan hubungan agar dapat terus maju dengan membenahi istiqomah, tekun untuk mencapai tujuan, dan melihat apa yang terjadi saat berdiri dihadapan Allah SWT.⁵⁰
5. Melakukan Kebiri Untuk Tujuan Pemandulan

Apabila melakukan pengebirian untuk maksud menjadikan seseorang perempuan atau laki-laki tidak dapat lagi menghasilkan keturunan secara total dengan cara-cara tertentu, maka para ulama fiqih dengan tegas menyatakan pengharamannya. Tindakan seperti ini disamakan dengan mengubur anak hidup-hidup.⁵¹

Keringanan hanya diberikan ketika ada kondisi darurat yang memaksa sehingga langkah pemandulan harus diambil. Sebagai contoh sebuah keyakinan

⁴⁹M. Abdul Mujieb dkk, *Ensiklopedia Tasawuf Imam Al-Ghazali*, (Jakarta : Mizan Publika, 2009) Cet, 1, hlm. 475.

⁵⁰Ibid, hlm. 475-476

⁵¹Syamsuddin al-Maqdisi, *Al-Furu`*, hlm. 281

akan terjadinya perpindahan suatu penyakit yang berbahaya dari orang tua kepada anaknya atau dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan sesuatu hal yang fatal, maka dalam situasi ini dapat ditetapkan kaidah :

“Mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mengupayakan kemaslahatan”.

Dengan demikian, diharuskan untuk memilih kemudharatan yang lebih ringan. Jika langkah pemandulan tidak ditempuh terdapat kekhawatiran akan penyebaran penyakit tersebut kepada keluarga terdekat atau orang lain, padahal hal tersebut dapat dicegah dengan cara melakukan pemandulan terhadap seseorang yang terjangkit penyakit berbahaya, dan ketika itu dilakukan maka statusnya telah berubah menjadi golongan orang-orang yang mandul dengan kehendak Allah SWT, sebagaimana yang disebutkan dalam dirman-Nya QS. Asy-Syuura : 49-50 :

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَا يَشَاءُ يَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّا وَيَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ
الذُّكُورَ. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَّا وَبِإِنَّهَا وَعِجْمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

Artinya : “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa.”⁵²

Adapun upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan secara temporal dan tidak secara total, maka tidak haram hukumnya, ditambah lagi dengan adanya uzur terhadap yang demikian, seperti upaya untuk dapat mendidik anak yang

⁵²Kemenag RI, *AL-Quran*, hlm. 791

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah ada secara baik. Tetapi apabila upaya pemandulan tersebut dilakukan tanpa uzur dan alasan tertentu maka menurut mazhab Syafi'i hukumnya makruh.⁵³

6. Hukuman Kebiri dalam Tinjauan Syar'i

Kebencian publik terhadap kasus pedofilia dan kasus kejahatan seksual terhadap anak memantik rasa keprihatinan yang mendalam dari masyarakat. Sekelompok orang dan organisasi yang terdiri dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan Nasional mengusulkan kepada pemerintah untuk melaksanakan hukuman kebiri atau kastrasi kepada para pelaku. Pengebirian tersebut diharapkan akan memberi dampak pada penghilangan dorongan seksual sehingga para pedofil dan pelaku bisa dicegah untuk memangsa korban baru.

Hukuman kebiri bagi pemerkosa sebenarnya sudah diterapkan di beberapa negara. Di Korea selatan misalnya, disamping menjalani hukuman kurungan (penjara), terpidana kasus pemerkosaan juga dikebiri secara kimia. Hal yang sama juga diterapkan di Inggris, Republik Ceko, Polandia, Swedia, Denmark, Jerman dan beberapa negara bagian Amerika Serikat. Selain negara-negara tersebut di atas, adapula negara yang masih memperbincangkan jenis hukuman kebiri ini, Diantaranya, Turki dan India.⁵⁴

Ulama yang setuju dengan hukuman kebiri ini lebih mengedepankan aspek maslahat ketika hukum kebiri diterapkan bagi pedofel dan pelaku tindakan kejahatan seksual terhadap anak. Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan

⁵³Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta, Gema Insani : 2011) jilid 4, hlm. 207

⁵⁴Supriyadi Widodo Eddyono dan Ahmad Sofian, *Menguji*, hlm. 14

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Cholil Nafis berwacana, pemberian hukuman kebiri pada terpidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak bisa memberikan efek jera (*zaw jir*). Hakim bisa berijtihad dalam memberikan hukuman dalam kasus ini dengan mempertimbangkan *zaw jir* tadi.

Namun pada hakikatnya, dalam kitab-kitab *turats*/klasik hukum Islam mayoritas ulama mengharamkan kebiri untuk manusia. Diantaranya, Imam Ibnu Abdil Bar dalam *Al Istidzk r*, Imam Ibnu Hajar Al-Asqolani dalam *Fathul B ri*, Imam Badaruddin Al-Aini dalam *Umdatul Qari*, Imam Al-Qurtubi dalam *Al-Jam`u al-Ahkam Al-Qur`an*, Imam Shan`ani dalam *Subulu al-Sal m* serta ulama-ulama fiqih lainnya. Ibnu Hajar al-Asqolani dan Syekh Adil Maturidi dalam *Al-Ahk m Al-Fiqhiyyah Al-Muta`alliqah bi Al-Syahwat* bahkan menyebut keharaman kebiri untuk manusia sudah menjadi ijmak ulama.

Selain ulama klasik terdapat pula ulama kontemporer yang mewakili kelompok kelompok organisasi keagamaan juga kontra terhadap pelaksanaan hukuman kebiri bagi manusia. Diantaranya berasal dari Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, asosiasi pondok pesantren Jawa Timur dan Hizbut Tahrir Indonesia. Mereka berdalil, kebiri berarti mengubah fisik manusia, melanggar HAM dan melahirkan jenis hukum baru yang tidak pernah dikenal dalam konsep hukum Islam.

Para ulama mengharamkan kebiri berdalil dengan hadis dari Ibnu Mas'ud R.A. yang mengatakan :⁵⁵

⁵⁵Imam Bukhari, *Hadis Sahih Bukhari*, (Surabaya : Gita Media Pres, 2009), Cet. I, hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : كُنَّا نَعْرُؤُا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا تَسْتَحْصِنُ فَهَآنَا عَنْ ذَلِكَ (رواه بخاري)

Artinya : “Diterima dari Ibnu Mas’ud ra. Dia berkata “kami pernah pergi berperang bersama Rasulullah saw., sedangkan kami tidak membawa isteri. Kami bertanya kepada beliau, apakah boleh kami dikebiri, maka beliau melarang kami melakukan hal itu.” (H.R. Bukhari)

Pembahasan terkait dengan kebiri ini pada beberapa kitab fiqh dan hadis jamak dimasukkan dalam pembahasan *munakahat* terkait larangan membujang bagi orang yang mampu menikah.⁵⁶ Sebagaimana hadis Rasulullah saw dari Said bin Abi Waqash :

:
(لَهُ لَا حُصَيْنًا)

Artinya : “Rasulullah saw menolak Usman bin Madz’un untuk membujang, andaikan dia dibolehkan membujang, tentu kami (para sahabat) akan berkebiri.” (H.R. Bukhari)

Selain hadis sahih yang tegas melarang pengebirian tersebut, ulama yang ingin berjihad dalam penetapan hukum Islam harus merujuk pada hukum-hukum asal yang telah ada. Untuk kasus pemerkosaan sebenarnya bisa diambil dari hukum asalnya, yaitu perzinahan atau homo seksual. Jika Pedofilia atau pelaku kekerasan seksual pada anak masuk pada kategori perzinahan maka hukumannya dicambuk sebanyak 100 kali bagi yang *ghoiru muhson*, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nuur : 2 :

⁵⁶Lihat, Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Terj. Mahyuddin Syaf (Bandung : PT. Al-Ma’arif, 1978), Jil. 6, cet. 1, hlm. 26-27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.⁵⁷

Sedangkan bagi yang *muhsan* dihukum rajam sampai mati apabila pelakunya. Jika pelaku termasuk ke dalam golongan *liwat* (homo seksual), maka ia dihukum mati. Jika hanya sebatas pelecehan seksual (*al-Taharusy al-Jinsi*) yang tidak sampai melakukan zina atau homo seksual, maka dihukum *ta'zir*.

Mereka yang kontra juga berpendapat bahwa hukum kebiri tidak dikenal dalam literatur hukum Islam. Walaupun sebenarnya pada zaman kuno tradisi kebiri ini lazim dilakukan, seperti tradisi kasim istana pada masa kerajaan Tiongkok kuno. Namun model hukuman kebiri atau pengebirian ini tidak diadopsi dan dipilih syariat islam sebagai hukuman alternatif bagi tindak kejahatan seksual khususnya pada anak.

Kebiri dengan suntikan kimiawi juga dikhawatirkan berdampak pada berubahnya hormon testosteron yang dominan dimiliki oleh pria menjadi esterogen yang dominan dimiliki oleh wanita. Akibatnya, laki-laki yang mendapatkan hukuman ini akan berubah dan memiliki ciri-ciri fisik seperti perempuan. Padahal syariat Islam jelas mengharamkan laki-laki yang menyerupai

⁵⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran*, hlm. 543



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan dan sebaliknya. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA :⁵⁸

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ
()

Artinya : “Rasulullah SAW telah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki.” (HR Bukhari).

Jika laki-laki yang menyerupai wanita diharamkan, maka wasilah yang menjadikan keharaman ini terlaksana juga diharamkan . Kaidah fiqih mengatakan: “Segala perantaraan menuju yang haram, hukumnya juga haram.”

Di antara pendapat pendapat yang pro-kontra terhadap persoalan kebiri ini, ada juga pendapat yang lebih moderat dari kalangan ulama kontemporer. Misalnya, kalangan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI). Ketua MIUMI KH. Hamid Fahmy Zarkasy mengatakan, pemerintah boleh-boleh saja menjadikan kebiri sebagai salah satu pilihan hukuman bagi terpidana kasus-kasus pedofilia. Namun ijtihad seorang hakim dalam menjatuhkan hukuman sangatlah menentukan. Tidaklah semua kasus yang akan mendapatkan hukuman kebiri. Hakim bisa berijtihad dengan kaidah fiqih *addharuratu tubihu al-mahdhurat* (keadaan terdesak dapat membolehkan hukuman yang sebenarnya terlarang).⁵⁹

⁵⁸Imam Bukhari, *Hadis*, hlm. 540

⁵⁹Hafidz Mufti Sany, *Hukuman Kebiri dalam Tinjauan Syar'i Kebiri Bisa Dilakukan dengan Pertimbangan Darurat*, dikutip dari <http://www.republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/15/10/30/> pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 jam 08.40 WIB.

Kondisi darurat yang dimaksudkan kaidah fikih mestilah benar-benar sesuai dengan definisinya, yaitu sudah pada tahap mengancam jiwa. Misalnya pelaku pedofilia residivis tersebut melakukan tindakan pembunuhan atau penyiksaan secara sadis kepada korbannya. Atau, bila hasratnya tidak terpenuhi, ia bisa menghilangkan nyawa korban. Sama halnya kondisi seseorang yang boleh memakan makanan yang haram jika sudah dalam kondisi kelaparan yang mengancam nyawanya. Sementara ia tidak menemui makanan yang halal. Artinya pemberlakuan kebiri tidak bisa dipukul rata bagi semua pelaku.

B. Pedofilia

Istilah pedofilia mulai dikenal luas oleh masyarakat Indonesia setelah marak terjadi kasus-kasus kejahatan seksual yang melibatkan anak-anak di bawah umur. Pedofilia merupakan sebuah kelainan yang diidap seseorang yang mendapatkan kepuasan secara seksual apabila melakukan tindakan seksual kepada anak-anak. Pedofilia dalam Islam adalah sesuatu yang dilarang dan bagi yang melakukannya akan dikenai *jarimah*. Pedofilia identik dengan aktifitas seksual yang menyimpang. Padahal Islam memandang aktifitas seksual tidak hanya sebatas menyalurkan hasrat biologis semata, melainkan lebih jauh yaitu mesti mengikuti norma, etika dan nilai-nilai agama dan kesusilaan.

Pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak kerap kali dilakukan oleh mereka yang memiliki kelainan ini. Nafsu sebagai sumber dari keinginan melakukan seks haruslah dijaga dan diarahkan kepada keinginan yang diatur melalui norma-norma agama. Secara naluri, seseorang yang memiliki hasrat seks yang normal akan menyalurkan keinginan biologisnya dengan normal pula.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbeda halnya apabila seseorang yang memiliki kelainan seksual dan ditambah pula dengan tiadanya kontrol agama dan iman dalam dirinya, maka mereka akan melampiaskan gejolak seksualitasnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya tanpa adanya filter dari agama dan keimanannya.

1. Defenisi Pedofilia

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab I tulisan ini, bahwa pedofilia adalah salah satu kelainan seksual yang di alami oleh orang dewasa yang mendapatkan kepuasan seksual melalui kontak fisik yang seringkali berhubungan seksual dengan anak-anak pra pubertas. Pedofilia berasal dari bahasa Yunani, yaitu *pedos* yang artinya anak dan *philia* yang artinya cinta kasih.⁶⁰

Pedofilia termasuk kepada kategori parafilia, yaitu perasaan seksual atau perilaku yang dapat melibatkan mitra seksual bukan manusia, atau yang melibatkan penderitaan atau siksaan oleh salah satu atau ke dua pasangan. Istilah parafilia pertama kali disebutkan oleh seorang psikoterapis yang bernama Wilhelm Stekel dalam bukunya *Sexual Aberation* tahun 1925. Parafilia juga mengacu kepada kelompok gangguan yang melibatkan ketertarikan kepada objek atau aktifitas seksual yang tidak biasa.

Dengan demikian secara umum istilah pedofilia digunakan untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual terhadap individu yang memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak.⁶¹ Keintiman dan kepuasan seksual oleh peaku pedofilia dicapai melaui sentuhan terhadap alat

⁶⁰Fachrudin, Jari Tangan, hlm. 51

⁶¹Sawatri Supardi S., Bunga Rampai, hlm. 71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

genetikal anak, menggesekkan kemaluannya kepada tubuh anak, melakukan masturbasi kepada anak atau melakukan penetrasi penis sebagian atau seluruhnya terhadap alat genetikal anak. Tak jarang pula anak-anak sering dipaksa untuk melakukan oral genital atau anal genital.

Perilaku penyimpangan seksual yang melibatkan anak-anak ini dapat berpengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak sehingga anak tersebut memiliki pandangan yang menyimpang mengenai hal yang berkaitan dengan seks sebagai akibat dari pengalaman yang dialaminya. Disamping itu perbuatan tersebut dapat menimbulkan efek traumatik secara psikologis, emosional, fisik dan sosial sehingga dalam jangka pendek dan jangka panjang anak mengalami depresi berkepanjangan, gangguan stres pasca trauma, kegelisahan, gangguan makan, perasaan rendah diri dan lain sebagainya.

2. Ruang Lingkup Pedofilia.

Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa secara umum pedofilia digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual terhadap individu yang memiliki hasrat erotis abnormal terhadap anak-anak. Dalam perspektif masyarakat lazimnya terdapat beberapa bentuk istilah yang masuk dalam kategori kekerasan seksual, seperti ; perzinahan, homoseksual, kumpul kebo, lesbian, pencabulan atau perkosaan. Hanya saja, dalam ranah kejahatan seksual kejahatan dalam bentuk pedofilia dipandang sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual yang melecehkan dan mencederai harkat kemanusiaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun demikian, dalam kacamata hak asasi manusia menikmati seks merupakan hak (*right*) orang dewasa sehingga hubungan seks yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau tanpa adanya paksaan di sebagian negara dianggap sesuatu hal yang wajar.⁶² Kecendrungan pemikiran seperti ini perlu segera diantisipasi agar pergeseran pemikiran terkait dengan seks merupakan hak asasi manusia dapat ditangkal dengan hal-hal lain, seperti penjelasan bahwa seks bebas akan dapat menimbulkan dampak munculnya penyakit-penyakit kelamin atau penyakit-penyakit yang berkaitan dengan seksual.

a. Macam-macam Pedofil

Dilihat dari objeknya, maka kejahatan seksual pedofilia yang dilakukan terhadap anak-anak terdiri dari dua jenis, yaitu :

- 1) Pedofilia homo seksual, yaitu objek seksualnya adalah anak laki-laki di bawah umur;
- 2) Pedofilia heteroseksual, yaitu objek seksualnya adalah anak-anak perempuan di bawah umur.

Adapun penyebab pedofilia antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Hambatan dalam perkembangan psikologis yang menyebabkan ketidakmampuan penderita menjalin relasi heterososial dan homososial yang wajar;
- 2) Kecendrungan kepribadian anti sosial yang ditandai dengan hambatan perkembangan pola seksual yang matang disertai oleh hambatan perkembangan moral;

⁶²Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), hlm. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Terdapat kombinasi *regresi*, ketakutan *important* serta rendahnya tatanan etika dan moral.⁶³

b. Dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan seksual pada anak

Ciri-ciri umum anak yang mengalami kekerasan seksual atau *sexual abuse* dapat diamati dalam beberapa tanda, yaitu :⁶⁴

1) Tanda-tanda perilaku

- a) Perubahan-perubahan mendadak pada perilaku; dari perilaku bahagia ke depresi atau permusuhan, dari perilaku bersahabat ke isolasi, atau dari perilaku yang awalnya komunikatif menjadi sosok yang penuh rahasia;
- b) Perilaku ekstrim; perilaku yang secara komparatif lebih agresif atau pasif dari teman sebayanya atau dari perilaku dia sebelumnya.
- c) Gangguan tidur; menunjukkan tanda-tanda perilaku takut ke tempat tidur, sulit tidur atau terjaga dalam waktu yang lama, mimpi buruk;
- d) Perilaku regresif; kembali kepada perilaku awal anak tersebut, seperti ngompol, menghisap jempol dan sebagainya;
- e) Perilaku anti-sosial atau nakal; bermain api, mengganggu anak lain atau binatang, tindakan-tindakan merusak;
- f) Perilaku menghindar; takut akan sesuatu atau menghindar dari sesuatu atau orang tertentu (orang tua, kakak, adik, saudara,

⁶³ Muhammad Asmawi, *Lika-liku*, hlm. 95

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 104

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetangga, pengasuh dan lain-lain. Adakalanya menunjukkan perilaku lari dari rumah, nakal atau membolos sekolah;

- g) Perilaku seksual yang tidak pantas; masturbasi berlebihan, berbahasa atau bertingkah porno melebihi usianya, perilaku seduktif terhadap anak yang lebih muda atau kerap menggambar gambar porno;
 - h) Penyalahgunaan NAPZA; alkohol atau obat-obatan terlarang khususnya anak remaja;
 - i) Bentuk-bentuk perlakuan salah terhadap diri sendiri, gangguan makan, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan beresiko tinggi, percobaan atau melakukan bunuh diri.
- 2) Tanda-tanda kognisi.
- a) Tidak dapat berkonsentrasi; sering melamun dan menghayal, fokus perhatian singkat/terpecah;
 - b) Minat sekolah memudar; menurunnya perhatian terhadap pekerjaan sekolah dibandingkan dengan sebelumnya;
 - c) Respon reaksi yang berlebihan; khususnya terhadap gerakan tiba-tiba dari orang lain dalam jarak dekat;
- 3) Tanda-tanda sosial - emosional.
- a) Rendahnya kepercayaan diri atau perasaan tidak berharga;
 - b) Menarik diri; mengisolasi diri dari teman, lari ke dalam khayalan atau bentuk-bentuk lain yang tidak berhubungan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Depresi tanpa penyebab yang jelas; perasaan tanpa harapan dan ketidakberdayaan, pikiran dan pernyataan-pernyataan ingin bunuh diri;
 - d) Ketakutan yang berlebihan; kecemasan, hilang kepercayaan terhadap orang lain;
 - e) Keterbatasan perasaan; tidak dapat mencintai, tidak riang seperti sebelumnya atau sebagaimana keriangannya teman seusianya.
- 4) Tanda-tanda fisik
- a) Perasaan sakit yang tidak jelas; mengeluh sakit kepala, sakit perut, tenggorokan tanpa penyebab yang jelas, menurunnya berat badan secara drastis, tidak ada kenaikan berat badan secara memadai, muntah-muntah;
 - b) Terdapat luka-luka pada alat kelamin atau mengidap penyakit kelamin pada vagina/penis atau anus yang ditandai dengan pendarahan, lecet, nyeri atau gatal-gatal di sekitar alat kelamin;
 - c) Hamil.

3. Fenomena Pedofilia di Indonesia

Dari catatan Committee Against Sexual Abuse (CASA), Lembaga Swadaya Masyarakat yang fokus pada kasus paedofilia di Bali, tertulis jika kasus kekerasan terhadap anak terjadi sejak 1996.⁶⁵ Provinsi Bali menjadi daerah dengan kasus pedofilia terbanyak di Indonesia. Pelakunya pun didominasi oleh wisatawan atau warga negara asing, bahkan ada yang berpendapat bahwa pulau

⁶⁵ Wisnoe Moerti dan Laurel Benny Saron Silalhi, *Sindiket Paedofil di Pulau Dewata*, Dikutip dari <https://www.merdeka.com/khas/sindiket-paedofil-di-pulau-dewata-predator-anak-di-bali>, diakses pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 pukul 10.35 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini menjadi gudangnya turis melakukan kejahatan ini.⁶⁶ Sebelum Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 disetujui oleh DPR RI Terdapat beberapa kasus yang menonjol yang dilakukan oleh para pedofel di Indonesia, yaitu :

- a. Pencabulan yang dilakukan oleh Mario Manara pada tahun 2001, seorang warga negara Italia berusia 57 tahun terhadap 9 orang anak kecil di Buleleng Provinsi Bali dengan modus memberikan uang dan pakaian kepada korban. Pengadilan memvonis Mario Manara dengan hukuman 9 bulan penjara. Pada tahun yang sama terjadi kembali kasus berikutnya di Karang Asem - Bali yang dilakukan oleh Michael Rene Heller, seorang wisatawan berkewarganegaraan Perancis berusia 56 tahun⁶⁷ yang melakukan pencabulan terhadap 3 orang anak remaja berusia 14 tahun pada rentang waktu Januari hingga Juni 2001. Modus yang dilakukan adalah dengan cara menjadikan korban sebagai anak angkat. Jaksa menuntut pelaku dengan hukuman tiga tahun penjara.⁶⁸
- b. Pada tahun 2004 terjadi kembali kasus pencabulan di Bali yang dilakukan oleh Tonny William Stuart Brown berusia 52 Tahun,⁶⁹ seorang warga negara Australia yang mencabuli 2 orang remaja IB (16 tahun) dan IM (14 tahun). Modus yang dilakukan adalah dengan membujuk korban menggunakan uang dan makanan. Pengadilan Negeri Karang Asem

⁶⁶ Faradina, *Inilah Kasus-Kasus Pedofilia di Indonesia Yang Bikin Masyarakat Trauma*, Dikutip dari <http://www.boombastis.com/kasus-pedofilia-indonesia/95695>, diakses pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 Pukul 10.00 WIB.

⁶⁷ Rina Nurjanah, *12 Kasus Pedofilia di Indonesia*, Dikutip dari <https://kumparan.com>, diakses pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 pukul 11.00 WIB.

⁶⁸ Driyandono Adiputra, *8 Kasus Pedofilia yang Bikin Geger Indonesia*, Dikutip dari <https://nasional.tempo.co/read/news/2014/04/25/063573121>, diakses pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2015 pukul 10.50 WIB.

⁶⁹ Rina Nurjanah, *12 Kasus*, Kumparan.com

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian memvonis pelaku dengan 13 tahun penjara pada Mei 2004. Sehari setelah menerima vonis, Brown bunuh diri di sel LP Abampura Bali.⁷⁰

- c. Pada tahun 2005 seorang warga negara Belanda bernama Max Le Clerco ditangkap setelah melakukan pencabulan terhadap bocah berinisial K yang baru berusia 9 tahun. Lokasi kejadian terjadi di Banjar Kaliasem, Kabupaten Buleleng, Bali. Modus yang dilakukan adalah membujuk korbannya dengan cara berpura-pura berbuat baik. Cara yang dilakukan adalah menjadi sponsor untuk kegiatan sepak bola anak-anak di kawasan lovina. Pelaku memberikan uang, kaos dan sepatu sepak bola untuk mengiming-imingi korban. Max ditahan pada 29 Juli 2005 dan atas perbuatannya, max kemudian dijerat dengan pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak *juncto* pasal 289 *juncto* Pasal 292 KUHP.⁷¹
- d. Pada tahun 2006, seorang warga negara Indonesia berinisial MH, berusia 37 Tahun, seorang karyawan air minum isi ulang dari Sidoarjo di tahan pihak Kepolisian setelah melakukan pencabulan terhadap 6 siswa sekolah dasar di Tabanan Bali. Pelaku melaksanakan aksinya dari tahun 2004. Modus yang dilakukan pelaku adalah dengan mengancam dan selalu memberikan upah sebanyak 1.000 rupiah setelah melakukan aksinya. Terbongkarnya kasus ini berawal dari tertangkapnya salah satu korban ketika ia sedang mencuri di plangkiran (tempat sembahyang) di pasar

⁷⁰ Driyandono Adiputra, 8 Kasus, nasional.tempo.co

⁷¹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabanan. Setelah diinterogasi polisi korban mengaku mencuri karena tak pernah lagi diberi uang setelah melakukan oral seks kepada pelaku. MH diancam dengan hukuman maksimal 15 Tahun penjara dan denda 300 juta rupiah.⁷²

- e. Pada tahun 2008, seorang kakek berusia 64 bernama Grandfield Philip Robert berkebangsaan Australia mencabuli remaja usia sekolah pertama (SMP) dan menengah atas (SMA) sebanyak 9 orang sepanjang tahun 2008 di Singaraja, Bali. Modus yang dilakukan sang kakek adalah dengan menyediakan meja biliar di rumahnya yang memancing para korban untuk kerumah tersangka. Permainan biliar yang dilakukan disertai dengan taruhan melakukan oral seks dan memberi imbalan 25-30 ribu. Vonis yang dikenakan kepada pelaku 8 tahun penjara.⁷³
- f. Pada tahun 2010, seorang warga negara Indonesia berusia 48 tahun yang bernama Baekuni alias Babe mencabuli 14 orang anak jalanan dan membunuh 14 orang korbannya, 4 di antara korbannya dimutilasi oleh tersangka di Jakarta pada tahun 2010. Babe adalah seorang koordinator pedagang asongan dan anak-anak pengamen jalanan. Modus yang dilakukan adalah dengan cara mengajak korban bermain *ding-dong* atau memberi makan. Kemudian korban dibunuh dengan cara dijerat lehernya. Setelah tewas, korban kemudian disodomi dan dimutilasi dan mayatnya dibuang. Baekuni alias Babe kemudian ditangkap di kedimannya pada

⁷² Rofiqi Hasan, *Enam Anak Sekoah Dasar di Bali Korban Pedofilia*, Dikutip dari <https://nasional.tempo.co/read/news/2006/06/13/05878789>, diakses pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 pukul 12.10 WIB.

⁷³ Rina Nurjanah, 12 Kasus, Kumparan.com

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Januari 2010. Pada tanggal 6 Juni Hakim pengadilan negeri Jakarta Timur kemudian memvonis Babe hukuman seumur hidup. Vonis ini pun diperkuat oleh putusan MA.⁷⁴

- g. Pada tahun 2014, Tjandra Adi Gunawan berusia 37 tahun, berkewarganegaraan Indonesia. Pelaku menyebarkan 10 ribu foto porno anak-anak di bawah umur pada Maret 2014 di Surabaya, Jawa Timur. Modus yang dilakukan adalah membuat akun Facebook dengan menyamar sebagai wanita yang berprofesi sebagai dokter kesehatan reproduksi remaja. Kemudian pelaku meminta korban untuk memfoto dirinya sendiri dari berpakaian lengkap hingga telanjang. Bahkan anak-anak tersebut sampai diminta melakukan masturbasi dengan difoto. Pelaku kemudian divonis 4 tahun penjara.
- h. Kasus yang menimpa siswa *Jakarta International School* (JIS) pada tahun 2014, kasus yang melibatkan lima orang warga negara Indonesia ini, yaitu Agun Iskandar, Virgiawan, Syahrial, Zaenal dan Afrischa Setyani dan dua orang warga negara asing, yaitu Neil Bantleman yang berkewarganegaraan Kanada dan Ferdinanat Tjong berkewarganegaraan Inggris. Kasus yang terjadi pada rentang waktu Januari 2013 – Maret 2014 ini merupakan tabir pembuka mata pemerintah untuk kembali melaksanakan revisi atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian melahirkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan ke Dua atas Undang-undang Nomor

⁷⁴ Driyandono Adiputra, 8 Kasus, nasional.tempo.co

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Modus yang dilakukan oleh Agun Iskandar dkk adalah dengan cara menahan anak berinisial MAK yang menggunakan toilet. Mereka kemudian divonis 7-8 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Sedangkan modus yang dilakukan oleh Neil Ferdinand dan Ferdinand Tjiong adalah dengan cara memanggil anak ke *Student Consulting*, lalu diberikan minuman berzat kimia agar mati rasa dan tidak sadarkan diri. Atas perbuatannya tersebut hakim tingkat kasasi Mahkamah Agung yang dipimpin oleh hakim agung Artidjo Alkostar kemudian membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang membebaskan Neil Bantleman dan Ferdinand Tjiong dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta sebelumnya yaitu menjatuhkan hukuman 11 tahun penjara subsidi 6 bulan dan denda 100 juta rupiah.⁷⁵

- i. Pada tahun 2015 kembali terjadi kasus pencabulan terhadap 11 orang anak perempuan pada kurun waktu 2014-2015 di Tabanan, Bali oleh Robert Ellis, pria berkewarganegaraan Australia berumur 70 tahun. Modus yang dilakukan adalah mengajak berbelanja dan memberi uang antara Rp. 100.000 - Rp. 300.000 untuk kemudian diajak ke rumahnya. Hakim kemudian menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 2 milyar rupiah, subsidi 6 bulan penjara.⁷⁶

⁷⁵ Dua Guru JIS Sudah Kembali ke Penjara, Dikutip dari http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/02/160226_, diakses pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017 pukul 03.00 WIB.

⁷⁶ Iwan Setiadarma, *Warga Australia Divonis 15 Tahun Penjara dalam Kasus Paedophilia*, dikutip dari <http://www.rappler.com/indonesia/berita/150302>, diakses pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017 pukul 03.20 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Pada tahun 2015 Agus Dermawan, seorang warga negara Indonesia berusia 39 tahun yang berprofesi sebagai bos geng Boel Tacos yang beranggotakan anak-anak di Kalideres Jakarta, ditangkap oleh pihak berwajib setelah melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap PNF berusia 9 tahun. Kasus ini bermula dari penemuan sesosok mayat di dalam kardus di jalan sahabat, Kelurahan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat pada bulan Oktober 2015. Pelaku kemudian dihukum dengan hukuman mati oleh ketua majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Barat Hanry Hengky Suatan karena terbukti secara sah melanggar pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana.⁷⁷
- k. Kasus yang menimpa Yuyun pada tanggal 2 April 2016 merupakan kasus pamungkas dari sederetan kasus-kasus Paedophilia sebelum pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kasus ini bermula dari korban yang pulang dari sekolah berpapasan dengan pelaku 14 orang yang kemudian mencegat dan menangkap korban. Kepala korban kemudian dipukul menggunakan kayu, kaki dan tangannya diikat, leher dicekik kemudian oleh para pelaku dicabuli secara bergantian. Hakim kemudian menjatuhkan hukuman yang beragam kepada para pelaku,

⁷⁷ Andri Donnal Putra, Agus "Boel Tacos" yang Membunuh Bocah dalam Kardus Divonis Hukuman Mati, Dikutip dari <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/21/19341371>, Diakses pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017 pukul 03.35 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu dari hukuman mati dan hukuman penjara 20 dan 10 tahun terhadap pelaku lainnya.

4. Pedofilia dalam Perspektif Islam

Dalam Islam perbuatan pedofilia merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dikenai jarimah. Pengertian jarimah sebagaimana yang dikemukakan oleh Mawardi adalah :⁷⁸

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٍ شَرَعِيَّةٍ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

Artinya : “Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir”.

Istilah lain dari jarimah yang sering digunakan adalah jinayah, sebagaimana yang dikatakan Abdul Qadir Audah :

الْجِنَايَةُ

لَا يَحِلُّ

Artinya : “Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.

Hukum pidana Islam memiliki ketentuan yang dapat dijadikan pertimbangan apakah suatu perbuatan dikategorikan sebagai suatu jarimah.

Terdapat tiga unsur yang harus terpenuhi, yaitu :⁷⁹

- a. Terdapat unsur formal (*al-rukn al-syar'i*), yaitu larangan-larangan atau terdapat perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman sesuai dengan yang terdapat pada nash

⁷⁸ Abu Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, (Mesir: Mushthafa Al-Halaby, 1975), hlm. 219

⁷⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam “Fiqh Jinayah”*, (Bandung; CV. Pustaka Setia, 2000), hlm 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Terdapat unsur material (*al-rukn al-madi*), suatu perbuatan yang membentuk jarimah, yang termasuk dalam kategori ini adalah pelanggaran terhadap sesuatu atau meninggalkan suatu perbuatan yang telah diwajibkan.
- c. Terdapat unsur moral (*al rukn al abadi*), yaitu objek yang dikenai hukuman atau dengan kata lain pelaku kejahatan yang dapat menerima *khitab* atau dapat memenuhi *taklif*, artinya pelaku kejahatan adalah mukallaf sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang telah mereka lakukan.

Keuniversalan yang terkandung dalam al quran tergambar dalam cakupannya yang meliputi seluruh aspek kehidupan, baik itu berkaitan dengan akhlak, etika, moral dan interaksi atau pergaulan sesama manusia yang dapat menimbulkan persoalan-persoalan yang timbul dari lingkungan sosial masyarakat. Salah satu persoalan yang dapat timbul dalam pergaulan masyarakat tersebut adalah pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Islam memandang aktifitas seksual tidak hanya semata sebatas memenuhi kepuasan dan hasrat seksual, akan tetapi juga berkaitan dengan etika dan nilai-nilai keagamaan. Ketentuan aktifitas seksual yang halal sudah ditentukan jalurnya oleh Islam yaitu melalui media perkawinan yang sah dengan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.

Selain memiliki akal, manusia juga diberikan nafsu oleh Allah SWT yang menjadi kekuatan manusia dalam mengetahui kefasikan dan cara menjauhinya.

Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Asy-Syam {91} ayat 7-9 :

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۚ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ۝

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.

Dalam ayat tersebut digambarkan bahwa nafsu sebagai semua sumber keburukan dan kesalahan bagi manusia. Nafsu juga menjadi salah satu musuh terbesar bagi manusia dan sangat berbahaya. Apabila tidak dapat dikendalikan maka akan dapat menjerumuskan kepada sifat sombong dan egoisme yang mementingkan diri sendiri agar keinginan yang didasarkan kepada kepuasan birahi dapat terpenuhi. Nafsu yang berkaitan dengan segala bentuk aktifitas seksual tidak bisa dilakukan sesuka hati. Orientasi seksual mestilah dilakukan atas jalur kehalalan dan bukan berorientasi pada gairah seks yang haram dan menyimpang.

Perbuatan jarimah apabila ditinjau dari hukumannya terbagi pada tiga bagian, jarimah *hudud*, jarimah *qishash* dan jarimah *ta'zir*.⁸⁰

- a. Jarimah *hudud*, adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *had* yang telah ditentukan syara' dan tidak ada batasan minimal atau maksimal.
- b. Jarimah *qishash* dan *diat*, adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qishash* dan *diat* yang juga sudah ditentukan oleh syara kadar dan ukurannya. Perbedaananya dengan hukuman *had* adalah hukuman *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat) yang tidak bisa digugurkan atau dimaafkan, sedangkan hukuman *qishash* dan *diat* adalah hak manusia (individu) di mana jarimah dalam bentuk ini bisa gugur apabila dimaafkan oleh korban atau keluarga korban.

⁸⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2005), hlm. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Jariman *ta'zir*, adalah jarimah yang hukuman yang dikenakan kepada pelaku perbuatan yang dilarang oleh syara' yang tidak ditemui bentuk sanksi had atau kifatatnya dalam nash, dengan kata lain *ta'zir* adalah hukuman yang menjadi hak *preogratif* diberikan atau ditentukan oleh hakim yang sifatnya berbentuk pengajaran. Hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batasan tertentu, mulai dari yang seringan-ringannya sampai hukuman seberat-beratnya.⁸¹

Perbuatan pedofilia dianggap sebagai perbuatan yang menyimpang dan dilarang karena bertentangan dengan fitrah Islam. Islam sudah mengatur tata cara yang dibenarkan dalam penyaluran hasrat seksual, yaitu dengan cara perkawinan yang sah dan dilakukan pada tempatnya (*faraj*). Kegiatan sek yang dibenarkan dalam Islam dilakukan secara heteroseksual, dilakukan oleh orang yang sudah mampu (*baligh*) yang bertujuan untuk reproduksi atau mendapatkan keturunan sebagai proses regenerasi.⁸²

Perbuatan penyimpangan seksual dalam kasus pedofilia apabila disandingkan dengan tindakan pemerkosaan yang mengandung unsur paksaan bahkan kekerasan, maka dapat dijatuhkan hukuman *hudud* untuk perbuatan zina yang dilakukan dan hukuman *ta'zir* untuk pemaksaan atau kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Ringan atau beratnya hukuman *ta'zir* yang dijatuhkan oleh hakim tergantung kepada jenis kejahatan yang dilakukan.⁸³

⁸¹ Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, (Semarang: Departemen Agama IAIN Wali Songo, 2005), hlm. 56

⁸² Baidatul Muchlis Asti, *Seks Indah Penuh Berkah*, (Semarang: Pustaka Adnan, 2006), hlm. 130

⁸³ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001), hlm. 47-48



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tindakan pedofilia dapat digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu pedofilia *heteroseksual* dan pedofilia *homoseksual* atau dalam islam dikenal dengan istilah *liwath*. Hukuman bagi orang yang melakukan *liwath* adalah sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud :

عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَنْ وَجَدَ
ثُمَّهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَقَتِلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ (رواه أبو داود والترمذي
وابن ماجه)

Artinya :“Dari Ikrimah dari Ibn Abbas ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, Siapa yang kamu dapati melakukan perbuatan kaum Luth (homoseksual) maka bunuhlah si pelaku dan yang dikerjainya (objeknya)”.⁸⁴

Imam mazhab selain Abu Hanifah berpendapat bahwa penyimpangan seks (*liwath*) digolongkan kepada perbuatan zina. Alasannya adalah bahwa perbuatan tersebut disamakan dengan perbuatan *fahisyah*, baik itu *wathi* yang dilakukan pada *qubul* (zina) ataupun *dubur* (homoseksual).⁸⁵ Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menyebutkan kata *fahisyah*, antara lain : Q.S. Al-Ankabut ayat 28 :

إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَنَأْتُوا لَفَحِشَةً مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu".⁸⁶

⁸⁴ Abu Dawud Sulaiman ibn Al-Asy'ats Al-Sajastani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Daar Al-Fikri, tt.), hlm. 153

⁸⁵ Ahmad Wardi Muchlis, *Hukum*, hlm. 12

⁸⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran*, hlm. 632

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikianpula dalam Q.S. Al-A'raf : 80 :

إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ

Artinya : “Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?.”⁸⁷

Selanjutnya dalam Q.S. An-Nisa' : 15, dijelaskan Al-Quran terkait dengan zina :

وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفَحِشَةَ مِنْ نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya : “Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji , hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.”⁸⁸

Sedangkan Hakim dan Abu Hanifah berpendapat, hukuman *liwath* tidak sama dengan hukuman zina. Alasannya, *liwath* adalah persetubuhan yang dilakukan pada tempat di luar tabi'at manusia. Allah menurunkan hukuman berupa rasa benci semua manusia, bahkan binatang terhadap pelaku *liwath*.⁸⁹

C. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Deretan kasus-kasus *phedophilia* yang terjadi di Indonesia menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat tertinggi se-Asia.⁹⁰ Tuntutan hukuman yang rendah terhadap para pelaku dijadikan sebagai kambing hitam terhadap

⁸⁷Ibid, hlm. 234

⁸⁸Ibid, Al quran, hlm. 118

⁸⁹Ibnu Al-Qoyyim Al-Jauziyyah, Jangan Dekati Zina, *Alih Bahasa Salim Bazemool*, (Jakarta: Qisthi Press, 2012), hlm. 54

⁹⁰FBI : Indonesia Tertinggi Pedofilia, Dikutip dari <http://kaltim.prokal.co/read/news/72570>, Diakses pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017 pukul 15.30 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

maraknya tindak kekerasan seksual terhadap anak. Dalam hal ini pemerintah sampai melakukan dua kali perubahan terhadap Undang-undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai perubahan ke dua.

Perubahan pertama terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terjadi akibat Undang-undang tersebut belum dapat berjalan efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundangundangan sektoral terkait dengan definisi anak, di sisi lain maraknya kejahatan terhadap anak di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual yang saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang dekat sang anak, serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas. Sehingga, berdasarkan paradigma tersebut maka undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang sudah berlaku kurang lebih 12 (dua belas) tahun akhirnya diubah dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perubahan ini untuk mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera serta mendorong adanya langkah kongkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata sang pelaku dulunya juga pernah mengalami (pelecehan seksual) sewaktu sang pelaku berusia anak

yang menjadikannya terobsesi untuk melakukan hal yang sama sebagaimana yang pernah dialami.⁹¹

Undang-undang momor 35 tahun 2014 yang mulai efektif berlaku pertanggal 18 oktober 2014 banyak mengalami perubahan “paradigma hukum”. Di antaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, serta dinaikkannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta diperkenalkannya sistem hukum baru yakni hak restitusi.

Ancaman hukuman terhadap pelaku dalam undang-undang perlindungan anak yang lama ancaman pelaku kejahatan seksual hanya diancam dengan pidana minimal 15 (lima belas) tahun, minimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal RP. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan minimal Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 diubah dengan ancaman pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Dalam undang-undang ini secara khusus menyebutkan jika pelaku pemerkosa atau pencabulan dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga pendidik maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Deretan kasus pedofilia yang terjadi di Indonesia pada umumnya dijerat dengan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hanya

⁹¹ Mulyawan, *Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-undang Perlindungan Anak*, Dikutip dari <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164>, Diakses pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2017 pukul 15.40 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saja fenomena yang ada “memaksa pemerintah” untuk melakukan revisi ke dua atas undang-undang tersebut. Pemerintah memandang bahwa negara dalam keadaan darurat kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan isi undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002, mengatur perubahan sanksi pidana tambahan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Di antara perubahan sanksi pidana signifikan dalam undang-undang tersebut adalah :

- 1) Ditambahnya ppidanaan denda menjadi Rp. 5 milyar dan pidana penjara bagi pelaku dengan ancaman maksimum 15 tahun dan minimum 5 tahun, jika dilakukan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
- 2) Jika mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku; jika pelaku merupakan seorang residivis atas tindakan sebagaimana disebutkan sebelumnya maka dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemasangan *chip*. Tindakan kebiri kimia dan pemasangan chip ini dilaksanakan di bawah pengawasan berkala oleh kementerian pada bidang hukum, sosial dan kesehatan;

- 3) waktu kebiri kimia paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Selain itu pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.

Sanksi berat disertai pidana tambahan yang cukup berat pula bermaksud untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak. Dengan sanksi yang demikian, pemerintah mengharapkan adanya efek jera bagi pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Pemerintah berpandangan bahwa meningkatkan pemidanaan merupakan cara paling efektif dalam menekan tindakan Pidana.⁹²

1. Hak Anak dalam Ketentuan Perundangundangan

Terdapat perbedaan dalam pengklasifikasian anak dalam beberapa ketentuan. Dalam *Convention On The Right Of The Child* (1989) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Hal ini senada dengan UNICEF yang mendefinisikan anak adalah mereka yang berusia antara 0 sampai dengan 18 Tahun. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia

⁹² Muhammad amin Putra, *Melihat Kembali Perpu 1 Tahun 2016*, Dikutip dari <http://leip.or.id/melihat-kembali-perppu-1-tahun-2016>, Diakses pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 pukul 7.30 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

21 tahun dan belum menikah. Sedangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun.⁹³

Apabila kita perhatikan, maka secara umum dapat dilihat bahwa anak adalah mereka yang berusia antara 0 sampai 21 tahun. Penjelasan mengenai batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, pertimbangan kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang yang umumnya dicapai setelah seseorang melampaui usia 21 tahun.

Sidang umum PBB tanggal 20 November 1959 telah menetapkan dan mendeklarasikan hak-hak anak secara universal. Harapannya tak lain adalah agar semua pihak baik individu, masyarakat, orang tua, organisasi sosial dan pemerintah mengakui dan mendorong agar terpenuhinya hak-hak anak tersebut.

Terdapat sepuluh prinsip tentang hak anak dalam deklarasi tersebut, yaitu :

- a. Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas hukum atau peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.
- c. Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
- d. Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.

⁹³ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung; Nuansa, 2006), hlm. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Setiap anak yang baik secara fisik, mental dan sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
- f. Untuk perkembangan pribadinya secara penuhi dan seimbang, setiap anak memerlukan kasih sayang dan pengertian.
- g. Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar.
- h. Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.
- i. Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindakan kekerasan dan eksploitasi.
- j. Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama dan bentuk-bentuk lainnya.

Pada tahun 1990 pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) PBB melalui Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1990. Konvensi Hak Anak (KHA) yang diadopsi dari majelis umum PBB tahun 1989 mengamanatkan bahwa setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal usul keturunan, agama maupun bahasa memiliki hak-hak yang terangkum dalam empat aspek, yaitu :

- a. Hak atas kelangsungan hidup, yang mencakup hak atas tingakt hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
- b. Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni budaya, serta kebebasan berfikir, berkeyakinan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beragama serta hak anak cacat atas pelayanan , perlakuan dan perlindungan khusus.

- c. Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam serta perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan agama.
- d. Hak partisipasi, yang meliputi hak kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hidup dirinya.⁹⁴

Disamping itu, Indonesia juga memiliki Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Dalam pasal 2 pada Undang-undang-undang tersebut dinyatakan :

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhannya khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa ia dalam kandungan maupun setelah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

⁹⁴ Abu Huraerah, *Kekerasan*, hlm. 21-22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 juga termaktub terkait dengan hak asasi anak yang merupakan hak mendasar bagi anak dan dilindungi oleh negara, pemerintah, keluarga maupun orang tua. Uraianannya dalam bentuk sebagai berikut :

- a. Pasal 62 ayat 1, anak mendapat perlindungan orang tua, masyarakat dan negara.
- b. Pasal 51 ayat 1, Hak melindungi sejak dini sejak dalam kandungan.
- c. Pasal 52 ayat 1, Hak hidup dan meningkatkan taraf kehidupan.
- d. Pasal 53 ayat 2, Hak mendapatkan nama dan status kewarganegaraan.
- e. Pasal 54, Hak mendapatkan perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus anak cacat fisik ataupun mental.
- f. Pasal 55, Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi.
- g. Pasal 55 ayat 1, Hak mengetahui, dibesarkan dan mengetahui orang tuanya.
- h. Pasal 56 ayat 2, Hak diasuh dan diangkat anak oleh orang lain.
- i. Pasal 57 ayat 1, Hak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing orang tua / wali.
- j. Pasal 57 ayat 2, Hak mendapat orang tua angkat atau wali.
- k. Pasal 58 ayat 1, Hak perlindungan hukum.
- l. Pasal 60 ayat 2, Hak pemberatan hukuman bagi orang tua, wali/pengasuh yang menganiaya anak (fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk, pelecehan seksual dan pembunuhan).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m. Pasal 59 ayat 1, Hak tidak dipisahkan dari orang tua.
- n. Pasal 59 ayat 2, Hak bertemu dengan orang tua.
- o. Pasal 60 ayat 1, Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- p. Pasal 62, Hak beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain dan berekreasi.
- q. Pasal 63, Hak tidak dilibatkan dalam peperangan, sengketa senjata, kerusuhan sosial dan peristiwa kekerasan.
- r. Pasal 64, Hak perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan dirinya.
- s. Pasal 65, Hak perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- t. Pasal 66 ayat 1, Hak tidak dijatuhkan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- u. Pasal 66 ayat 2, Hak tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
- v. Pasal 66 ayat 3, Hak tidak dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum.
- w. Pasal 66 ayat 4, Hak penangkapan, penahanan atau pidana hanya sebagai upaya terakhir.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- x. Pasal 66 ayat 6, Hak bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif bagi anak yang dirampas kebebasannya.⁹⁵

Selanjutnya, pada tanggal 23 September 2002 DPR-RI menyetujui draft Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan menetapkan menjadi Undang-undang pada tanggal 22 Oktober 2002. Semenjak pemberlakuan undang-undang ini, maka posisi anak Indonesia menjadi semakin kuat dan dilindungi. Hak-hak anak termaktub dengan tegas, di antaranya sebagai berikut :

- a. Hak hidup dan berkembang anak.
Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 4).
- b. Hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan
Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (pasal 5).
- c. Hak kebebasan beragama
Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (pasal 6).
- d. Hak asuh oleh orang tua kandung atau wali
Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (pasal 1) dan dalam hal suatu sebab

⁹⁵ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 144-146.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2) serta setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (pasal 14).

e. Hak mendapatkan sarana kesehatan yang layak

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (pasal 8).

f. Hak memperoleh pendidikan formal

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (pasal 9 ayat 1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (pasal 9 ayat 2).

g. Hak dihargai suara dan pendapatnya.

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan (pasal 10).

h. Hak kebebasan berekspresi dan berinteraksi sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, beraksi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri (pasal 11).

i. Hak mendapatkan bantuan sosial

Setia anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (pasal 12).

j. Hak mendapatkan perlindungan di setiap sisi oleh orang tua, wali serta masyarakat dan lembaga-lembaga tertentu.

1) (Pasal 13 ayat 1), Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan :

- a) Diskriminasi;
- b) Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual;
- c) Penelantaran;
- d) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
- e) Ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

2) (Pasal 13 ayat 2), dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

3) (Pasal 15), setiap anak memperoleh perlindungan dari :

- a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - e) Pelibatan dalam peperangan.
- 4) (Pasal 16 ayat 1), Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi.
 - 5) (Pasal 16 ayat 2), Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai hukum.
 - 6) (Pasal 16 ayat 3), Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
 - 7) (Pasal 17 ayat 1), Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
 - c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
 - 8) (Pasal 17 ayat 2), Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9) (Pasal 18), setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.⁹⁶

2. Kebutuhan Anak dalam Ketentuan Perundang-undangan.

Semua manusia memiliki kebutuhan dasar yang mesti dipenuhi, tidak terkecuali dengan anak. Anak juga memiliki kebutuhan yang dituntut untuk dipenuhi sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan wajar. Kebutuhan dasar yang sangat penting bagi anak adalah adanya hubungan yang sehat antara kedua orang tua dan anak, seperti kasih sayang, pendekatan, perhatian, perlindungan, dorongan dan pemeliharaan. Sedangkan kebutuhan umum yang harus dipenuhi secara umum adalah perlindungan (keamanan), pendekatan, perhatian, dan kesempatan untuk terlibat dalam pengalaman positif yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan mental anak yang sehat. Secara terperinci kebutuhan anak dapat dijabarkan sebagai berikut:⁹⁷

- a. Kasih sayang dari orang tua
- b. Stabilitas emosional
- c. Pengertian dan perhatian
- d. Pertumbuhan kepribadian
- e. Dorongan kreatif
- f. Pembinaan kemampuan intelektual dan keterampilan dasar
- g. Pemeliharaan kesehatan
- h. Pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal yang sehat dan memadai

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 150-154

⁹⁷ Abu Haraerah, Konsep, hlm. 27



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Aktivitas reaksional yang konstruktif dan positif
- j. Pemeliharaan, perawatan dan perlindungan

Untuk menjamin pertumbuhan fisiknya, anak membutuhkan makanan yang bergizi, pakaian, sanitasi dan perawatan kesehatan. Mereka membutuhkan pemeliharaan dan perlindungan dari ke dua orang tua sebagai sandaran dan perantara mereka ke dunia nyata. Untuk menjamin perkembangan psikis dan sosialnya, anak membutuhkan kasih sayang, pemahaman, suasana rekreatif, stimulasi yang kreatif, aktualisasi diri dan pengembangan intelektual. Sejak diri mereka diperkenalkan pada pendidikan dan sosialisasi dasar, pengajaran tanggung jawab sosial, peran-peran sosial dan pengenalan keterampilan dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Anak-anak akan mengalami hambatan terhadap pertumbuhan fisik, intelektual, emosional dan sosialnya apabila anak mengalami hal-hal sebagai berikut :⁹⁸

- a. Kekurangan gizi dan tanpa perumahan yang layak
- b. Tanpa bimbingan dan asuhan
- c. Sakit dan tanpa perawatan medis yang memadai
- d. Diperlakukan salah secara fisik
- e. Diperlakukan salah dan dieksploitasi secara seksual
- f. Tidak memperoleh pengalaman normal yang menumbuhkan perasaan dicintai, diinginkan, aman dan bermartabat

⁹⁸ Edi Suharto, *Pembanguna Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung; Lembaga Studi Pembangunan-Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 1997), hlm. 363-364.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Terganggu secara emosional karena pertengkaran keluarga yang terus menerus, perceraian orang tua dan mempunyai orang tua yang mengalami gangguan mental/jiwa
- h. Dieksploitasi, bekerja berlebihan, terpengaruh oleh kondisi yang tidak sehat dan demoralisasi.

Apabila proses pemenuhan kebutuhan tersebut mengalami kegagalan, maka akan berdampak negatif pada pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual, mental dan sosial anak. Anak bukan saja akan mengalami kerentanan fisik, melainkan juga akan mengalami hambatan mental, lemah daya nalar yang kelak akan dapat menjadi pemicu mereka menjadi manusia tidak normal dan perilaku kriminal.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam penelusuran yang penulis lakukan terhadap karya ilmiah terdahulu terdapat beberapa pembahasan yang mirip dengan penelitian ini, hanya saja penelitian-penelitian tersebut dilakukan sebelum diterbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, di antaranya adalah :

1. Skripsi Ngabdul Munngim.⁹⁹

Mengangkat tema kebiri dengan judul “Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia”. Dalam abstrak karyanya dikatakan bahwa penjatuhan sanksi pidana pedofilia di Indonesia belum seimbang dengan dampak yang ditimbulkannya. Oleh karenanya diperlukan

⁹⁹Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, NIM. 11340110

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembaharuan karena dianggap sanksi yang digunakan saat ini belum menimbulkan efek jera. Upaya pembaruan yang dilakukan pemerintah tersebut dilakukan melalui kebiri.

Oleh karena skripsi ini dikeluarkan sebelum sanksi kebiri resmi dijadikan Undang-undang, maka Sdr. Ngabdul Munngim mengangkat permasalahan kemungkinan sanksi kebiri sebagai sanksi alternatif terhadap pelaku tindak pidana pedofilia.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukannya, Sdr. Ngabdul Munngim menyimpulkan bahwa pengaturan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia di Indonesia diatur dalam KUHP dan UUPA yang menyamakan dengan pasal-pasal yang mengatur tindak pidana kesusilaan. Sanksi yang diatur dalam pasal tersebut kurang relevan dengan konteks kekinian. Oleh karena itu sanksi kebiri dapat digunakan sebagai alternatif sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia.

2. Skripsi Ahmad Sandi.¹⁰⁰

Mengangkat tema Hukum Kebiri bagi Pelaku Pedofilia dalam Perspektif Hukum Islam dan Peluang Penerapannya di Indonesia. Kajian yang diangkat oleh Sdr. Ahmad Sandi diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana syari'ah pada tanggal 22 September 2015.

Dalam skripsinya Sdr. Ahmad Sandi mengatakan bahwa hukuman kebiri yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah kebiri kimia (*chemical castration*), yaitu pemberian suntikan MPA

¹⁰⁰ Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, NIM 1110043200038

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*medroxyprogesterone acetate*) yang berfungsi untuk menekan libido seseorang, sehingga hasrat yang muncul akibat hormon testosteron bisa berkurang bahkan hilang.

Sehubungan dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap tindakan kejahatan, peran seorang hakim sangat menentukan terutama untuk kasus pedofilia. Hakim berhak menjatuhkan hukuman apabila terdakwa terbukti melakukan pelanggaran yang telah ditentukan dalam Undang-undang yang berlaku, dengan kata lain penentuan hukuman tersebut diserahkan kepada penguasa yang mana penguasa dimaksud diwakili oleh hakim.

Dalam hukum pidana Islam penetapan hukuman oleh hakim atau *waliyyul Amri* atas kadar minimum dan maksimum dapat dikategorikan sebagai hukum *ta'zir*, karena dalam jarimah *had*, hukuman telah ditetapkan dalam nash dan terdapat hak Allah di dalamnya dan tidak ada diperbolehkan untuk melakukan pengurangan dan penambahan hukuman. Maka dari itu hukuman kebiri kimia dikategorikan ke dalam *ta'zir* yang jenis hukumannya belum ada dalam nash dan yang dikenakan kepada pelaku pedofilia termasuk ke dalam kategori *ta'zir* yang kadar hukumannya ditentukan oleh hakim.

Hukuman kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana pedofilia dianggap sudah mencakup unsur yang terdapat pada suatu hukuman, yaitu : sebagai upaya pembalasan (*revenge*) atas perbuatan melanggar hukum atas ketentuan yang sudah dibuat atau ditetapkan. Menghapus dosa (*expiation*), memberikan efek jera (*deterent*) bertujuan agar pelaku tindak pidana tidak melakukan pelanggaran yang sama atau bahkan sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan tersebut. Perlindungan terhadap umum, upaya untuk memberikan rasa aman terhadap masyarakat terutama objek yang dijadikan sasaran oleh pelaku yaitu anak-anak. Upaya memperbaiki pelaku kejahatan (*rehabilitation of criminal*), dalam hal ini pemberian suntikan MPA sudah banyak dilakukan oleh beberapa negara dan terbukti dapat membantu untuk mengurangi libido. Namun dalam penjatuhan kebiri kimia memiliki kadar minimal dan maksimal yang ditentukan oleh hakim dengan bantuan ahli medis yang ditunjuk oleh pengadilan.

Selanjutnya dari pembahasan-pembahasan yang dilakukan oleh Sdr. Ahmad Sandi, dia berpendapat bahwa hukuman bagi tindak pidana pedofilia adalah hukuman rajam. Karena tindakan pedofilia merupakan sebuah tindakan yang mengakibatkan dampak sangat berat terhadap korban dan dapat menimbulkan efek traumatik yang berkepanjangan, penyakit kelamin yang berasal dari pelaku, bahkan dapat menjadikan korban sebagai pelaku pedofilia disebabkan oleh pengalaman yang dialaminya.

Segala bentuk tindakan atau hubungan yang berkaitan dengan seksual dalam islam telah diatur untuk disalurkan melalui perkawinan yang sah. Sehingga apapun bentuk kejahatan yang dilakukan yang ada hubungannya dengan seksual dianggap sebagai sebuah kejahatan perzinahan yang dikenai hukuman dera atau rajam. Hukum rajam sendiri terdapat hak Allah di dalamnya dan jenis hukumannya sudah ditentukan sendiri oleh Allah SWT.

3. Tesis Diyah Ayu Hardiyani.¹⁰¹

¹⁰¹ Mahasiswi Universitas Sebelas Maret

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Judulnya adalah Urgensi Pidana Kebiri bagi Pelaku Pedofilia di Indonesia.

Tesis: Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini mengkaji tentang urgensi pidana kebiri bagi pelaku pedofilia di Indonesia. Dalam abstraknya disebutkan secara medis kebiri kimiawi hanya berfungsi untuk menekan dorongan fisiologis (hormonal) terhadap seks. Sementara pedofilia itu bukan dilakukan untuk sekedar pemuasaan dorongan fisiologis tersebut, sebab dorongan fisiologis atau sering disebut dengan libido dapat dipenuhi dengan berbagai cara lain. Apabila pedofilia bertindak hingga memperkosa seorang anak, berarti ada keinginan yang lebih tinggi dari sekedar libido, tetapi keinginan psikologis untuk menguasai, mendominasi atau menyakiti. Keinginan ini adalah keinginan yang tidak dapat dihilangkan oleh kebiri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 hukuman kebiri diberlakukan. Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal dalam sifat penelitian preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan dianalisis menggunakan logika deduktif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa kebiri kimiawi memunculkan efek brutalisasi, pengebirian justru membuat pelaku menstimulasi aksi-aksi kejahatan yang berlipat ganda. Targetnya juga tak hanya anak-anak, semua bisa berpotensi menjadi korbannya. Pedofilia mempunyai masalah yang sangat kompleks, sehingga tidak bisa dijangkau hanya melalui hukuman kebiri. Berdasarkan kajian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang dilakukan melalui teori pemidanaan dan teori kontrol sosial Donald Black. Pidana kebiri bukan solusi yang tepat bagi pelaku pedofilia di Indonesia. Menurut teori pemidanaan, pelaku pedofilia membutuhkan Reformative yakni bertujuan merehabilitasi pelaku dengan norma-norma masyarakat yaitu menjadi anggota taat hukum. Selanjutnya menurut teori kontrol sosial Donald Black, maka pedofilia dikonsepsikan model Theurapetic. Pedofilia adalah korban yang melakukan penyimpangan karena kelainan psikologis, sehingga pedofilia membutuhkan bantuan agar dapat sembuh dari kelainannya tersebut. Implikasi dari penelitian ini adalah mengetahui urgensi pidana kebiri bagi pelaku pedofilia. Apabila pidana kebiri diterapkan bagi pelaku pedofilia tidaklah efektif, karena pelaku mengalami gangguan psikologis. Kebiri kimiawi hanya akan memberikan penderitaan bagi pelaku dan tidak memberikan efek jera. Dibutuhkan penyembuhan bukan pemidanaan bagi pedofilia. Melalui rehabilitasi, pedofilia dapat kembali menjadi orang yang normal. Pemberian terapi ini harus didukung oleh semua komponen pemerintah dan masyarakat.¹⁰²

¹⁰² Diah Ayu Hardiyani, *Urgensi Pidana Kebiri bagi Pelaku Pedofilia di Indonesia*, dikutip dari <https://eprints.uns.ac.id/29771/>, diakses pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 pukul 15.45 WIB.